

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL KAMPANYE
PERIKLANAN FILM SERIAL KOMEDI PEMBAURAN,”
BENGKEL KOH APIANG”. PRODUKSI PT. SENTRA
FOCUS AUDIO VISUAL.**

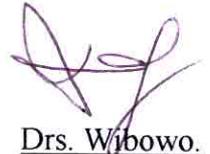


KARYA DISAIN

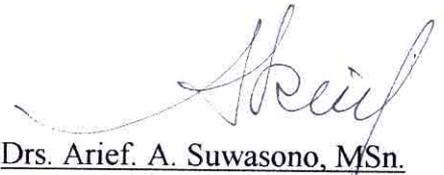
**Oleh:
BUDHI SULISTIA HAMID
9310662023**

**Tugas Akhir ini diajukan kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dalam bidang
Disain Komunikasi Visual
2000**

Tugas Akhir Karya Disain ini telah diterima oleh Tim Penguji Jurusan Disain
Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 29 Juli 2000.



Drs. Wibowo.
Pembimbing I / Anggota



Drs. Arief. A. Suwasono, MSn.
Pembimbing II / Anggota



Drs. Aznar Zacky.
Cognate / Anggota.



Drs. Baskoro Suryo Banindro.
Ketua Program Studi Dikomvis / Anggota



Drs. M. Umar Hadi, MS.
Ketua Jurusan Disain / Ketua / Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Rupa



Drs. Sukarnan
NIP. 130521245

KATA PENGANTAR.

Tugas Akhir ini merupakan karya final dari seorang mahasiswa Institut Seni Indonesia, Yogyakarta selama studinya untuk meraih gelar kesarjanaan di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Dari Tugas Akhir inilah bisa dilihat tingkat kemampuan seseorang dalam menyerap dan menerapkan ilmu yang dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan. Sungguh bukan merupakan suatu tugas mudah untuk di wujudkan. Dengan segala daya dan upaya yang ada penulis telah mencurahkan kemampuannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karenannya penulis mengucapkan puji syukur sebesar – besarnya atas berkat dan balutan kasih-Nya, yang memungkinkan segalanya berjalan baik dan lancar. Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak – banyak terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. I Made Bandem**, selaku Rektor ISI Yogyakarta.
2. **Bapak Drs. Sukarman** , selaku Dekan FSR ISI Yogyakarta.
3. **Bapak Drs. M. Umar Hadi, MS**, selaku Ketua Jurusan Disain FSR ISI Yogyakarta.
4. **Bapak Drs. Baskoro Suryo Banindro**, selaku Ketua Program Studi Disain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta.
5. **Bapak Drs. Wibowo**, selaku Dosen Pembimbing I, atas semua arahan, saran dan kesabarannya.
6. **Bapak Drs. Arief. A. Suwasono, M.Sn**, selaku Dosen Pembimbing II, atas semua arahan, saran dan kesabarannya.

7. **Bapak Drs. Asnar Zacky**, selaku cognate terima kasih atas saran dan kesabarannya.
8. **Bapak Drs. Tata Tjandrasat**, selaku sekretaris.
9. **Bapak Drs. Sunardi, S.U.**
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Diskomvis.
11. Kedua Orang Tua saya, Kakak dan Adik saya yang telah mencintai saya
12. **Bapak. Ali Shahab** Presdir PT. Sentra Focus Audio Visual atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, **Mbak Jessy, Mba Ai** dan mbak – mbak lainnya, seluruh Staf dan karyawan PT. Sentra Focu Audio Visual.
13. Keluarga besar saya di Jogja, **Pak DE, Bu DE, Mbah, Yudi**, Mbak Asih sekeluarga
14. Keluarga besar **Bapak Jaswadi**.
15. Teman – teman Krapyak, **Iwan** (buat pinjaman bukunya), **Kak Mo , Babahe Iis, Targo, Petruk, Tedjo, Anissa café**, anak – anak Dhewe, **Londo, Petrus**, anak – anak wisma tuna asmara, **Sigit, Rona, Dodi, Kope**, Teman – teman Diskomvis, **Jek** (sekeluarga), **Jon, Meyeng** (sekeluarga), **Bintang, Iyek, Granados, Hajar, Windu** dan semua teman – teman Diskom 93 yang tidak bisa saya sebut satu – satu, **Anta, Irawan, Babe**, Komunitas 579, **Mande, Away, Danil, Kipli**, teman – teman depok, **Moron, Blacke, Ag, Michael, Kiwil, Meita, Wira** dll, **Anton Surabaya, Rachel, Keluarga besar Darwoto**, serta teman – teman ISI yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan cinta kasih, nyuwun sorry yo...

16. Dan semua pihak yang telah membantu saya secara materi dan spirit, semoga Tuhan memberkati kalian semua.

Tentu dengan keterbatasan yang ada Karya Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, karena baik dan buruknya karya – karya tersebut, saya serahkan sepenuhnya kepada khalayak pembaca dan penikmat. Segala kritik dan saran merupakan penilaian untuk lebih baik dimasa datang, kurang lebihnya penulis ucapkan mohon maaf dan terima kasih.



Yogyakarta, 29 Juli 2000,

BUDHI SULISTIA HAMID.



Dedicated for:
Jesus Christ.
Papah Mamah tercinta.
Kakak Ai dan Adikku lin tercinta.
My Sweet Little Angel ?

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Rumusan Masalah.	10
D. Tujuan Perancangan.....	10
E. Lingkup Perancangan.....	11
F. Langkah – Langkah Perancangan.....	12
BAB II IDENTIFIKASI	14
A. Pengumpulan Data.....	14
1. Data Perusahaan.	14
2. Tinjauan Produk Pasar.....	22
a. Spesifik Produk.....	22
b. Profile Pemirsa.....	23
c. Peta Persaingan.....	24
d. Posisi Produk.....	24
e. Potensi Pasar.....	25
B. Pengolahan Data.....	25
C. Penetapan – Penetapan.....	26

	1. Tujuan Pemasaran Produk	26
	2. Strategi Pemasaran Produk	27
BAB III	KONSEP DISAIN	29
	A. Sintesis	29
	1. Tujuan dan Strategi Promosi	29
	2. Tujuan Komunikasi Periklanan	30
	B. Konsep Media	31
	1. Tujuan Media	33
	2. Strategi Media	34
	3. Program Media	38
	4. Biaya Media	44
	C. Konsep Kreatif	45
	1. Tujuan Kreatif	45
	2. Strategi Kreatif	45
	3. Strategi Visual	47
	4. Pedoman Kreatif	48
	a. Tema Pokok	48
	b. Pendukung Tema	48
	5. Pedoman Bentuk Kreatif	48
BAB IV	LAY OUT	66
	A. Alternatif	67
	B. Eksekusi	101
BAB V	PENUTUP	102

A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
Daftar Pustaka	104
Lampiran.	105

DAFTAR TABEL.

1. Tabel Jadwal Media.....	39
2. Tabel Daftar Rencana Strategi Kreatif.....	43
3. Tabel Biaya Media	44





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Untuk suatu proses yang dikatakan integrasi nasional sebagai wujud satu kesatuan bangsa sama rata di atas hukum, namun realitasnya secara sosial pemakaian istilah Pri dan Non pri, pengambilan kebijaksanaan pemerintah terhadap warga keturunan dengan pemakaian kode untuk kartu tanda penduduk mereka, pendiskriminasian terhadap etnis ini dalam melakukan segala aktivitas sosialnya adalah suatu yang sangat jelas bagaimana proses pembauran ini hanya sebuah realitas semu, pseudo sosial, apapun analoginya yang jelas jauh dari maksud dan tujuan pembauran atau asimilasi. Secara sosiologis warga keturunan ini sudah banyak berkorban untuk benar-benar dengan apa yang dinamakan pembauran, mereka rindu sekali dengan predikat yang sama sebagai warga pribumi dan ikut merasakan memiliki bumi, tanah air ini, hal ini dinyatakan dengan merelakan menggantikan nama mereka, dengan tidak memakai nama asal mereka, pemakaian bahasa, dan sudah banyak pula warga keturunan yang melakukan pernikahan campur dengan etnis lain, secara religius pun mereka sudah membaurkan dirinya.

Proses pembauran atau asimilasi ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebetulnya pada masa Orde Baru adalah mungkin bisa dikatakan merupakan fase pengakuan dan persepsi masyarakat terhadap WNI keturunan sebagai bagian dari bangsa Indonesia telah mencapai tingkat tertinggi secara

perspektif politik, proses asimilasi secara substansial politik hampir tidak pernah bermasalah, ini sangat jauh berbeda sebelum jamannya Orba. Tetapi secara ekonomi dan realitas sosial justru pada masa Orde Baru sudah tercipta secara tidak sadar jurang pemisah yang sangat dalam dan lebar, kebijaksanaan yang diambil pada saat pemerintahan Orde Baru sangat dirasa tidak *fair*, dalam merangkul pelaku-pelaku ekonomi antara WNI keturunan dan WNI yang bukan keturunan, contohnya pemberian pinjaman modal usaha di bank-bank. Pengambilan kebijaksanaan ini menciptakan suatu *gap* yang dirasa sangat jelas, di satu sisi telah terjadi suatu ke-eksklusif-an sehingga tercipta suatu komunitas konglomerasi yang sangat dekat dengan elit politik dan disatu pihak terjadi suatu kecemburuan yang amat sangat dan inilah yang meracuni persepsi warga pribumi terhadap WNI keturunan, ingat kerusuhan pertengahan Mei 1998 adalah awal tumbanganya Orde Baru.

Sebetulnya kalau kita mau renungkan apa yang terjadi setelah kerusuhan, akses dari setiap kerusuhan justru menimpa rakyat kecil dan juga pada khususnya menimpa WNI keturunan yang sangat jauh bahkan di luar dari komunitas konglomerasi yang disebut tadi. Kehadiran serta dominasi elit Tionghoa yang eksklusif sangat mencolok itu menciptakan keinginan atau aspirasi nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan, mentransformasikan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional belum terwujud secara tuntas. Idealnya Pri atau Non pri sebagai pelaku ekonomi hendaknya bahu membahu menguatkan ekonomi nasional dengan aturan mainnya Non pri harus punya jiwa pribumi, sedangkan Pribumi harus lebih dalam menjiwai kepribumiannya.

Permasalahan asimilasi memang seperti api dalam sekam, sangat eksplosif dan menjadi persoalan yang sangat krusial dalam setiap lembaran sejarah bangsa Indonesia menuju satu kesatuan bangsa yang integral. Secara historis memang bangsa Indonesia sudah dikondisikan dengan suatu proses disintegrasi yang diwariskan oleh kolonial Belanda melalui strategi "*Divide et Impera-nya*", menurut H.Junus Jahja dalam tulisannya, menyebutkan pada saat penjajahan Belanda, penjajah Belanda membagi penduduk Nusantara kedalam 3 golongan yaitu:

- paling atas bangsa eropa
- di tengah bangsa timur asing, mayoritasnya cina
- di bawah sekali "*Inlanders*", bumi putera atau pribumi.¹

Ketiga kelompok ini hidup terpisah satu sama lain dan memainkan peranan serta kedudukan ekonomi yang sangat berbeda.

Memang sejak dari dulu sudah ada penyekatan-penyekatan antar Pribumi dan Nonpribumi, dan tidak heran hingga saat ini hubungan kedua golongan tersebut jauh dengan apa yang disebut mesra. Menurut catatan Baharudin Lopa dari tulisannya, menuliskan keturunan etnis Tionghoa memang selalu menjadi sasaran amuk massa sejak awal Kemerdekaan, Jaman Demokrasi Terpimpin maupun pada awal Orde Baru, terjadi kerusuhan di beberapa tempat setidaknya sampai 15 kali (dalam peristiwa berskala lokal, regional maupun nasional) antaranya:

¹ H. Junus Jahja, "Masalah Orang Thionghoa di Indonesia", *Kapok Jadi Non Pri*, Cetakan I, Jakarta, 1998, hal. 82.

- Kerusuhan Tangerang, aksi bumi hangus etnik Tionghoa tidak berpihak kepada pemerintahan Indonesia (1946).
- Gerakan Assaat yang diikuti peristiwa Han-Haryono dalam bidang ekonomi (1956).
- Aksi penutupan sekolah Tionghoa (karena keterlibatan dalam PRRI) dan pembatasan gerak ekonomi (1957).
- Kerusuhan Cirebon, sebagai reaksi terhadap kongres Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang anti asimilasi (Mei 1963).
- Kerusuhan Bandung dan Sukabumi, sebagai reaksi lanjutan terhadap kongres Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang anti-asimilasi (Mei 1963).
- Penumpasan G-30-S/PKI yang diikuti perusakan dan pembakaran bangunan etnis Tionghoa "kiri" (1965).
- Penutupan toko-toko etnik Tionghoa asing dan aksi serta kontra aksi dengan pengerusakan dan pembakaran bangunan milik Tionghoa di Jawa Timur (1966).
- Pelarangan kegiatan ekonomi dan politik Tionghoa asing di Sumatera Selatan, Jambi, Lampung (1966).
- Pengusiran orang-orang etnis Tionghoa yang terlibat G-30-S/PKI dari Kalimantan Barat (1966).
- Larangan terhadap Tionghoa asing dalam perdagangan di Ujungpandang (1967).

- Kerusuhan dan perusakan di Jakarta (1967).
- Kerusuhan Manado, akibat penghinaan terhadap Nabi Muhammad
- Pengusiran etnis Tionghoa dari Aceh (1967).
- Penyerangan terhadap pengungsi Tionghoa di Medan (1967).
- Kerusuhan Surabaya (1967), akibat isu dari penggantungan dua orang anggota Marinir di Singapura;

Adapun aksi kerusuhan setelah tahun 70-an lebih banyak terkait dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik (kepentingan), seperti yang terjadi di Kudus, Surakarta (1981), Medan (1995), Situbondo (1996), krisis Sembako di daerah Jawa-Bali (1998), 14-15 Mei di Jakarta dan Surakarta. Dalam kerusuhan massa ini, terutama yang terjadi akhir-akhir ini lebih dipicu oleh persoalan dominasi ekonomi dan kolusi oleh kelompok elit WNI etnis Tionghoa dengan kekuasaan.²

Ancaman-ancaman yang merujuk ke terjadinya disintegrasi bangsa sangat besar kalau saja tidak ada penanganan yang khusus dari pemerintah. Namun setelah terjadinya G-30-S/PKI, pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam penanganan permasalahan etnis ini, dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan pokok tentang permasalahan etnis Tionghoa dalam rangka penciptaan satu kesatuan bangsa antara lain, sama apa yang ditulis H. Junus Jahja, antar lain sebagai berikut:

1. Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966, tentang pembinaan kesatuan bangsa tanggal 5 Juli 1966.

² Baharudin Lopa, Pandai – pandailah Membedakan Hukum dan Praktek Hukum, “*Kapok Jadi Non Pri*”, Cetakan I, Jakarta, 1998, hal. 71

Hal-hal yang relevan dalam keppres ini antara lain: merealisasikan dengan konsekuen larangan perangkapan kewarganegaraan; mempercepat proses integrasi melalui proses asimilasi warga negara keturunan asing dan menghilangkan segala hambatan-hambatan yang mengakibatkan yang tidak harmonisnya hubungan mereka dengan warga negara asli.

2. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi warganegara Indonesia memakai nama Cina.

Keputusan ini berkaitan dengan prosedur yang sangat mempermudah etnik Tionghoa yang ingin ganti (secara sukarela) dengan nama Indonesia. Hampir semua WNI keturunan mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia setelah keputusan ini di keluarkan.

3. Instruksi Presiden no. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, adat istiadat Cina tanggal 6 Desember 1967.

Kebijakan pemerintahan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril bagi warga negara Indonesia lainnya. Hal ini dinilai dapat menghambat jalannya proses asimilasi. Adapun isi instruksi tersebut adalah:

Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, Tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek

afinitas kultural pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan; perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok didepan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga;

Instruksi ini dianggap sangat penting untuk mengurangi jarak antar etnik Tionghoa dengan warga negara lainnya. Selain itu dengan adanya instruksi ini, maka pertunjukan seperti Barongsay, Arak-arakan Toapekong, dan perayaan Imlek (memang sejak tahun 1960 memang sudah kurang populer) dirayakan dalam lingkungan intern dan keluarga.

4. Keppres 240/1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing

Dalam kebijakan ini ditentukan bahwa WNI keturunan asing adalah sama kedudukannya didalam hukum dengan bangsa Indonesia lainnya. Dan, pembinaannya dijalankan melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial. Dinyatakan pula, bahwa perbedaan perlakuan antara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia asli ditiadakan dan tidak dobenarkan. (Perbedaan satu-satunya terdapat di UUD 45 Pasal 6 ayat 1 yang mencantumkan syarat Indonesia asli bagi Presiden RI).

5. GBHN

Kemudian , Kebijakan pembauran terhadap etnik Tionghoa masuk dalam GBHN sejak 1978. Dalam GBHN 1988 dinyatakan bahwa, "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik dibidang ekonomi maupun sosial, dan budaya dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional".³

Jelas sudah dari ketentuan-ketentuan di atas pemerintah sudah bertekad dan menerapkan politik asimilasi atau pembauran etnis di Indonesia dengan serius.

Lepas dari semua itu kalau kita mau merenungkan kembali, sebetulnya perang, krisis yang paling besar dan rentan yang kita hadapi adalah moralitas, dan penulis sangat setuju unsur dari semua keberhasilan ini semua adalah *key word*-nya adalah moral. Betapa hebatnya hirarki hukum, agama, serta dogma-dogma tentang satu kesatuan bangsa, tidak akan berguna kalau tidak disertai kualitas moral yang mumpuni, jika kita ingin membangun kualitas moral masyarakat, harus kita ingat moral masyarakat adalah implementasi dari moral individunya. Moral individu pada gilirannya secara sengaja dan tidak sengaja dibentuk dari lingkup sosial terkecil yaitu keluarga. Disini keluarga sangat dominan memberikan doktrin-doktrin untuk mencetak manusia-manusia yang kualitas

³ op, cit, H. Junus Jahja, hal. 86

moralnya tinggi, yang akhirnya nanti mereka akan berhadapan dan dapat menjawab semua realitas sosial yang ada dengan baik dan bijak.

Memang sudah sangat perlu adanya publisitas mengenai proses pembauran etnis yang efisien dan efektif secara berkesinambungan lewat media massa, khususnya media televisi saat ini, karena kalau melihat karakter dari media tersebut, dapat menjangkau khalayak sasaran sangat luas selain itu sangat efisien dan efektif.

Melihat kebutuhan masyarakat akan hal keperdulian pembauran etnis, maka PT. SENTRA FOCUS AUDIO VISUAL berkerjasama dengan stasiun televisi AN-teve menyelenggarakan suatu program untuk mengajak perduli akan proses pembauran etnis yang dikemas dalam sebuah bentuk serial komedi pembauran yang berjudul, "BENGKEL KOH APIANG". Yang dirasa sangat pas ditampilkan secara santai dan ringan dan disertai bobot pendidikan serta wawasan terhadap fenomena etnis yang sedang bergejolak akhir-akhir ini.

B. POKOK PERMASALAHAN.

Konflik etnis yang terus berkelanjutan dapat mengancam kestabilan nasional yang merujuk kearah disintegrasi bangsa, ini bukannya hal yang tidak mustahil terjadi kalau memang tidak ada keseriusan bukan saja dari pemerintah saja, tapi marilah kita memulai dari diri kita masing-masing yang mempunyai perasaan saling mencintai, nasionalisme yang tinggi terhadap negara ini.

PT. SENTRA FOCUS AUDIO VISUAL, mengajak untuk peduli dengan proses pembauran etnis, melalui suatu program televisi yang dikemas kedalam sebuah sinetron komedi seri berjudul, "BENGKEL KOH APIANG", memberikan nuansa baru dalam dunia perfilm-an khususnya film layar kaca, karena saat ini memang dirasa sangat perlu adanya sebuah pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat diterima oleh setiap khalayak tanpa batas, dengan media massa, khususnya televisi inilah yang dirasa sangat efektif dan efisien.

C. RUMUSAN MASALAH.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana merancang komunikasi visual yang efektif dan efisien guna mendukung promosi dan publikasi film serial komedi pembauran, "BENGKEL KOH APIANG".

D. TUJUAN PERANCANGAN.

Adapun tujuan perancangan sebagai berikut:

- Merancang strategi bagaimana mensosialisasikan program pembauran tersebut dengan efektif dan efisien melalui media komunikasi visual.

- Membuat perancangan komunikasi visual yang tepat guna mendukung promosi dan publikasi film serial komedi pembauran,"BENGKEL KOH APIANG".
- Mendukung strategi pemasaran yang pada akhirnya menarik pihak televisi dan pengiklan.

E. LINGKUP PERANCANGAN.

1. Wilayah perancangan yang menjadi panduan yang akan diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah menitik beratkan pada perancangan komunikasi visual yang mendukung pensosialisasian program pembauran etnis, lewat sinetron serial komedi pembauran, "BENGKEL KOH APIANG".
2. Wilayah perancangan komunikasi visual menitik beratkan pada periklanan sebagai panduan promosi dan publikasi untuk sinetron serial komedi pembauran,"BENGKEL KOH APIANG", tujuannya menarik perhatian pemirsa, stasiun televisi, dan pihak sponsor (pengiklan).
3. Wilayah perancangan menarik perhatian pemirsa, stasiun televisi dan pihak sponsor (pengiklan).
4. Wilayah jangkauan, yaitu: khalayak yang peduli dengan pembauran etnis, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Geografis : Nasional (seluruh Indonesia).

- Demografis

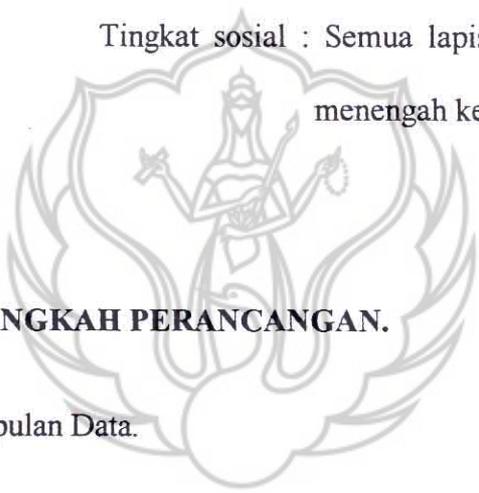
Jenis kelamin: Laki-laki - wanita.

Umur : Segala umur (prioritas 14 tahun keatas).

- Psikografis

Kepribadian : Nasionalis, peduli dengan pembauran etnis.

Tingkat sosial : Semua lapisan masyarakat (prioritas menengah keatas).



F. LANGKAH-LANGKAH PERANCANGAN.

1. Pengumpulan Data.
2. Data Produk.
3. Data Pemasaran.
4. Pengolahan Data.
5. Perencanaan Media
 - Penyusunan Anggaran.
 - Perumusan Media.

6. Perancangan Kreatif

Perancangan kreatif terdiri dari:

- Perancangan media utama.
- Perancangan media penunjang.



